

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai salah satu Negara Demokrasi, Indonesia telah menganut dan melaksanakan sebarang praktek demokrasi yang dikenal dengan Demokrasi Pancasila dalam memilih pemerintahannya yang dipahami secara umum sebagai pemerintahan yang dipilih oleh, dari dan untuk rakyat melalui suatu sistem pemilihan umum yang bersifat langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil yang melingkupi ketercakupan segala elemen kebangsaan dalam konteks negara kesatuan yang berasaskan Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah dituntut harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu sebagai sebuah bentuk upaya manifestasi demokrasi di Indonesia.

Dalam menyelenggarakan pemilu tentunya membutuhkan peran aktif dan partisipasi masyarakat, karena pemilu bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memilih pemimpin sesuai dengan keinginan dan hati nurani mereka. Pemilu memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan siapa calon yang akan diberi amanah oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan. Agar pemilu dapat terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan suatu pola komunikasi yang dapat digunakan oleh KPU Kota Pariaman terkait dengan perannya sebagai penyelenggara pemilu. Pola Komunikasi yang dimaksud berfungsi sebagai penghubung antara KPU sebagai institusi/ lembaga pemerintah dengan masyarakat secara keseluruhan. Karena

suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari peran serta masyarakat khususnya masyarakat di Kota Pariaman.

Salah satu upaya membangun komunikasi dengan masyarakat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi kepemiluan. Sosialisasi pemilu adalah suatu bentuk komunikasi eksternal yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu kepada masyarakat. Di Negara demokrasi pelaksanaan pemilu merupakan hajatan lima tahunan yang dilakukan untuk memilih pemimpin apakah itu kepala daerah, Anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, karena dengan pemilu rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung dengan cara berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya di TPS.

Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU Kota Pariaman memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar agar hajatan lima tahunan ini berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar serta jujur dan adil. Untuk itu dibutuhkan suatu pola komunikasi yang efektif agar penyelenggaraan pemilu ini dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih sehingga pemilu dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta menghasilkan pemimpin yang merupakan representasi dari pilihan masyarakat agar pemerintah yang lahir dari mekanisme pemilu mendapat dukungan dan kepercayaan yang besar dari konstituennya (masyarakat) itu sendiri.

Berkaca dari beberapa kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman, adanya kecenderungan pelaksanaan sosialisasi sering dirumuskan dalam pola linear (satu arah) dengan bentuk propaganda saja. Pola

linear tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menanggapi atau sekedar mengkosok informasi pemilu yang diperoleh. Sehingga ambiguitas atau ketidak pahaman akan proses pelaksanaan pemilu dapat diminimalisir dengan ketersediaan informasi yang mampu mengurangi ketidak tahuan masyarakat tentu pada akhirnya akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Untuk itu, KPU sebagai sumber informasi dalam pelaksanaan pemilu perlu merancang dan memformat pesan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dengan menedepankan konsep *edutainment*, yaitu pola komunikasi yang lebih menekankan pada aspek edukasi dan tidak lupa menyematkan konsep hiburan agar komunikasi yang dibangun menjadi menarik dan menyenangkan. Adapun pemakaian pola sosialisasi satu arah kurang memperhatikan umpan balik dari masyarakat. Sehingga efek dari sosialisasi yang dilakukan kurang memberi dampak yang diinginkan karena hanya monoton satu arah dan hanya menekankan pada aspek formal saja.

Perlu adanya terobosan baru yang dilakukan KPU Kota Pariaman agar kegiatan sosialisasi ini lebih menarik, seperti melakukan pendekatan yang lebih disukai oleh masyarakat. Untuk konteks Kota Pariaman sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman perlu mengedepankan kearifan lokal dalam artian pelaksanaan sosialisasi lebih memperhatikan pada budaya dan kebiasaan masyarakat. Seperti memanfaatkan acara tabuik yang digelar oleh Pemerintah Kota Pariaman sebagai momentum untuk mensosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat Kota Pariaman dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan Pariaman Fair dengan cara mendirikan stand sosialisasi pemilu untuk memberikan layanan dan menyediakan

data dan informasi tentang pelaksanaan pemilu di Kota Pariaman, dimana setiap pengunjung stand dapat melakukan pengecekan langsung apakah sudah terdaftar sebagai pemilih melalui perangkat dan sarana yang disediakan oleh KPU Kota Pariaman. Sehingga sosialisasi yang dilakukan dapat berlangsung dengan cara interaktif, karena masyarakat dapat bertanya secara langsung kepada KPU tentang hal-hal yang kurang mereka pahami tentang proses pelaksanaan pemilu.

Sosialisasi pemilu adalah suatu bentuk pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk menginformasikan tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dirumuskan suatu pola komunikasi yang efektif agar pesan kepemiluan (*electoral message*) dapat sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Banyak sekali ragam informasi pemilu yang harusnya dapat disampaikan kepada masyarakat Kota Pariaman. Penyampaian pesan tentunya juga harus memperhatikan saluran yang dapat secara efektif menjangkau masyarakat. Seperti yang sudah dilakukan pada pemilu sebelumnya, sosialisasi pemilu hanya mengandalkan media luar ruang, pola sosialisasi seperti hanya menyediakan informasi tentang tahapan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh KPU saja, tidak mampu menginformasikan proses pelaksanaan pemilu secara keseluruhan sesuai dengan tahapan yang telah dibuat oleh KPU Republik Indonesia.

Sosialisasi yang baik tentunya dilakukan dengan menentukan pola komunikasi, *packaging* pesan yang dibuat semenarik mungkin dan pemilihan saluran (media) juga mempengaruhi sejauh mana informasi yang disampaikan mampu untuk memperluas dan mengedukasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, karena partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan keberhasilan pemilu.

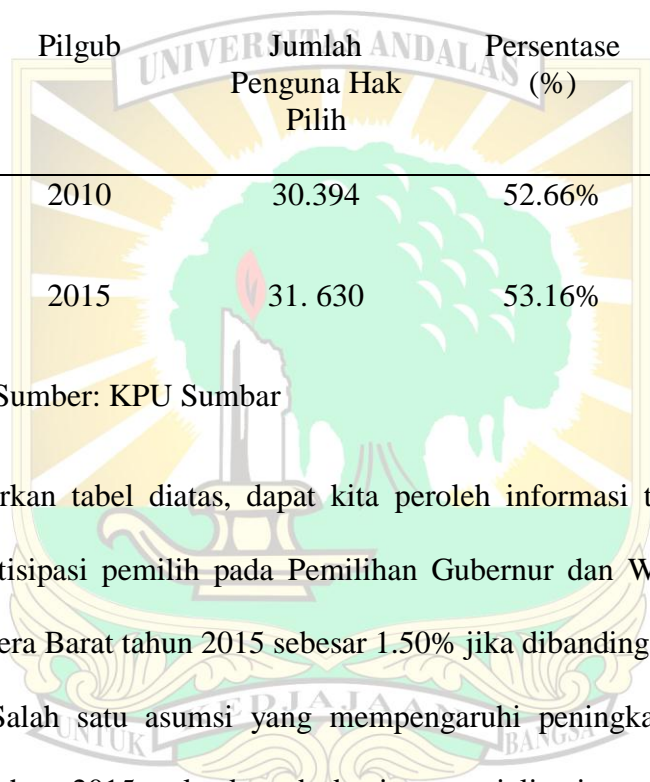
Partisipasi masyarakat dalam pemilu sering juga disebut dengan partisipasi politik yang dilaksanakan oleh setiap warga Negara yang telah memiliki hak pilih. Dalam Negara demokrasi partisipasi politik merupakan hal yang dapat mempengaruhi demokrasi. Sebagaimana dipaparkan oleh *Verba* dan *Nie* bahwa Partisipasi Politik sebagai *cornerstone* dan jantung demokrasi. Sementara itu, dilain sisi, *Halender* mengungkapkan bahwa partisipasi politik merupakan prasyarat utama dalam sebuah Negara demokrasi, serta dipertegas oleh *Sylvester* dan *McGlynn* yang menyatakan bahwa demokrasi tidak akan bermakna apa-apa dan legitimasi tanpa ada partisipasi warga dalam proses demokrasi. Dengan kata lain, tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan perwujudan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah yang terpilih sebagai pemenang dalam pilkada (Najmuddin.2015:193).

Pola sosialisasi tentunya diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu KPU perlu memikirkan adanya suatu standar dan pola sosialisasi agar informasi tentang pelaksanaan pemilu ini benar-benar sampai kepada masyarakat luas, sehingga tidak ada lagi kesalahan informasi yang akan mencederai proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. Berkaca dari perolehan suara dari pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Pariaman tahun 2010 lebih rendah jika dibandingkan dengan perolehan suara pada tahun 2015 lalu. Ada hal yang mendasar mengapa hal itu bisa terjadi, salah satunya dilihat dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemilu di tahun 2015 lebih variatif jika dibandingkan dengan tahun 2010, perbedaan pola sosialisasi ini tentunya memiliki kontribusi terhadap peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pemilu. Berikut tabel tren perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Kota Pariaman.

Tabel. 1.1

Trend Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tingkat Kota Pariaman Dilihat dari 2 (dua) Periode



Pilgub	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Persentase (%)
2010	30.394	52.66%
2015	31.630	53.16%

Sumber: KPU Sumbar

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita peroleh informasi tentang adanya peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sebesar 1.50% jika dibanding dengan Pilgub Tahun 2010. Salah satu asumsi yang mempengaruhi peningkatan partisipasi pemilih pada tahun 2015 terletak pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sudah jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini dilihat dari pola komunikasi yang dibangun tidak lagi hanya mengandal metode liner yang hanya bersifat satu arah saja, melainkan sudah di kembangkan lagi dengan memanfaatkan media sebagai saluran komunikasi dengan mengedepankan dialogh dengan masyarakat untuk setiap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman.

Walaupun adanya peningkatan partisipasi pemilih yang berhasil dicapai oleh KPU Kota Pariaman pada Pilgub tahun 2015 belumlah menyentuh target capaian partisipasi pemilih yang ditargetkan oleh KPU Republik Indonesia secara nasional. untuk daerah yang sedang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015 KPU RI memasang target capaian partisipasi pemilih sebesar 77,5% dari jumlah penduduk yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun hal itu belum bisa dicapai karena banyaknya faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu. Untuk Kota Pariaman kenaikan partisipasi pemilih sebesar 1.50% jika dihitung dari total partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih di Kota Pariaman masih berada pada angka 6,50%. Secara khusus peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Kota Pariaman ini berhasil memperbaiki peringkat Kota Pariaman ditingkat Provinsi, karena pada Pilgub tahun 2010 Kota Pariaman hanya menduduki peringkat kedua dari bawah dari 19 Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat rendah. Namun pada tahun 2015 dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat maka Kota Pariaman dapat memperbaiki posisinya sehingga berada di peringkat ke-tujuh dari Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Adanya tren penurunan partisipasi masyarakat khususnya untuk Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu faktor kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Asrinaldi, M.Si pada media daring Antara Sumbar tanggal 4 November 2015 yaitu;

‘Salah satu penyebab turunnya partisipasi politik pada Pilkada tahun 2015 diantaranya mekanisme sosialisasi yang menggunakan metode non verbal melalui alat peraga kampanye yang ternyata tidak efektif, karena kenyataannya pesan itu tidak sampai kepada masyarakat’

Mengacu pada pernyataan diatas, maka perlu dibuat suatu terobosan kegiatan terkait dengan pelaksanaan sosialisasi di setiap pelaksanaan pemilu agar pesan yang disampaikan dapat mengedukasi dan mempersuasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilgub Sumatera Barat. Berikut tren penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Tabel. 1.2

Trend Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dilihat dari 2 (dua) Periode Pelaksanaan Pilgub

Pilgub	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Persentase (%)
2010	2.111.835	63.62%
2015	2.079.063	58.65%

Sumber: KPU Sumbar

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa ada penurunan partisipasi pemilih pada tahun 2015 di tingkat Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dari dua periode pelaksanaan Pilgub. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada tahun 2015 menurun sebesar 6% jika dibandingkan

dengan partisipasi yang dicapai pada tahun 2010. Keberhasilan KPU Kota Pariaman dalam memperbaiki perolehan partisipasi pemilih pada Pilgub tahun 2015 perlu dicermati dari pola komunikasi yang dibangun dalam rangka memasyarakatkan pemilu kepada masyarakat luas dengan cara melaksanakan komunikasi yang interaktif melalui kegiatan sosialisasi yang beragam.

Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih ini, diantaranya yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, serta sikap apatis masyarakat terhadap pemilu itu sendiri karena tak jarang pemimpin yang terpilih melalui pemilu lupa dengan janji-janji yang diberikan kepada masyarakat saat mencalonkan diri sebagai pasangan calon yang maju menjadi kepala daerah.

Untuk suksesnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Kota Pariaman tidak lepas dari peranan dan fungsi KPU Kota Pariaman sebagai penyuplai informasi pemilu. Adanya kewajiban untuk menginformasikan, mengedukasi serta mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih dalam Pemilu dilakukan melalui pendekatan komunikasi melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Menurut Ritcher JR sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat (Efriзал.2012:139). Dengan kata lain sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat (pemasyarakatan). Dalam konteks yang lebih spesifik, Sosialisasi diberi pengertian khusus dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang

untuk selanjutnya menjadi panduan standard dan resmi bagi KPU secara nasional, yaitu sebagai ‘Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan’ yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

“Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan”.

Sebagaimana suatu kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman dalam rangka mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kota Pariaman, Sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Partipasi politik erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap calon yang akan dipilih sebagai pemimpin. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dengan atau memenuhi hidupnya (Ramlan.1992:5). Sedangkan menurut *Herbert McClosky* partisipasi berkaitan dengan seseorang sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Budiarjo.2008:150). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka fokus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan **tentang Pola Komunikasi dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 di Kota Pariaman.**

1.2 Rumusan Masalah

Peningkatan partisipasi pemilih yang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 di Kota Pariaman, tidak lepas dari peranan KPU Kota Pariaman yang berupaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi kepemiluan yang beragam, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pendekatan dan membangun komunikasi dengan masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dalam rangka menggunakan hak politiknya untuk memilih kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kota Pariaman).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pola Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Sosialisasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 di Kota Pariaman?
2. Bagaimanakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mendeskripsikan pola komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 di Kota Pariaman;
2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah;

a. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pikiran dan informasi kepada KPU Kota Pariaman sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait sosialisasi pemilu agar dapat meningkatkan jumlah pemilih yang memberikan hak pilihnya pada saat Pemilu ditingkat Kota Pariaman.

b. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Komunikasi terutama pada aspek pelaksanaan sosialisasi pemilu yang selama ini dilakukan dengan pendekatan tatap muka dan bermedia yang bersifat satu arah. Sedangkan penelitian ini dibangun tidak hanya menggunakan pola komunikasi bermedia dan tatap muka saja, melainkan juga memperhatikan aspek budaya yang melatar belakangi kebiasaan

masyarakat Kota Pariaman, sebagai upaya pendekatan sosialisasi dalam rangka penyampaian informasi yang bertujuan untuk mengedukasi dan mempersuasi masyarakat Kota Pariaman agar memiliki kesadaran yang tinggi untuk menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemilu.

